

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STUDI PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(STUDI PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
RUMBAI PESISIR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Jelita Gea

NPM : 147110815

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Jelita Gea
NPM : 147110815
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

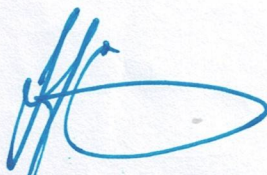
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan

Pekanbaru, 4 Desember 2020

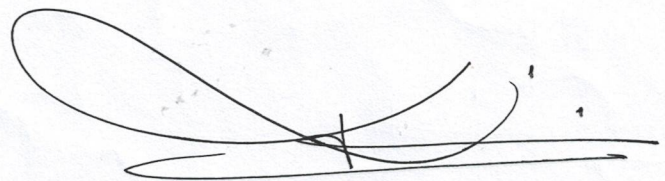
Turut Menyetujui,

Kaprodi Studi Administrasi Publik,

Pembimbing I,



Lilis Suryani, S.Sos, M.Si



Dr. H. Ahmad Tarmizi Yussa, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

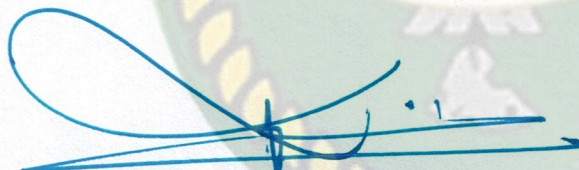
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Jelita Gea
NPM : 147110815
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

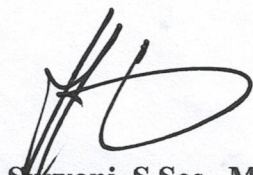
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua

Pekanbaru 04 Desember 2020
Sekretaris,

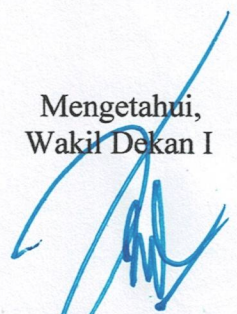


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

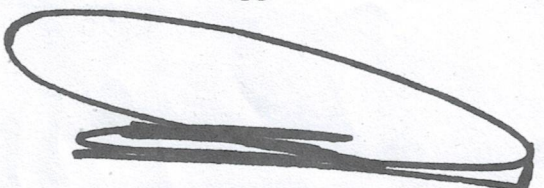


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota,

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

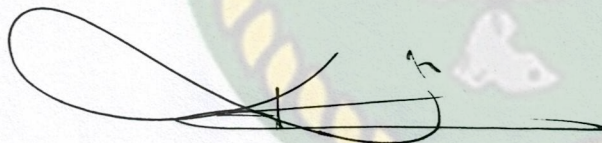
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jelita Gea
NPM : 147110815
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

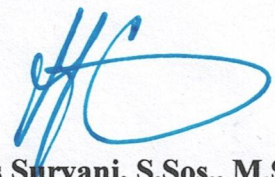
Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administrasi dan Akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru 04 Desember 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua



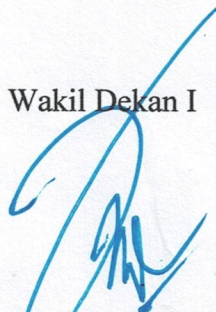
Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

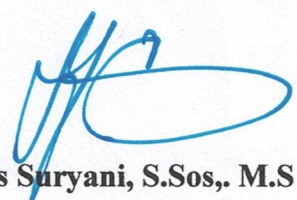
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Prodi Administrasi Publik



Lilis Suryani, S.Sos., M.S

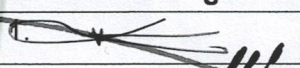
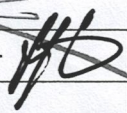
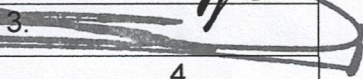
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

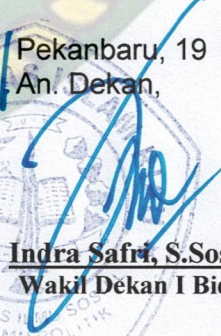
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1171/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 November 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Jelita Gea
NPM : 147110815
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)**
Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	1. 
2.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 19 November 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1171/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmu dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WDA) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Jelita Gea
N P M : 147110815
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si/
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi
Yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit
Tanda bukti dan ucapan terima kasih ku kepada
Segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang
Telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku
Sampai saat ini.
Khusus untuk Ayahanda
Bersama Ibunda yang tercinta. Terima
Kasih atas seluruh limpahkan kasih sayang yang tidak
Berbatas yang telah beliau curahkan kepada ku,
Semoga Allah Swt tetap melimpahkan Rahmat dan
Karunia yang tiada terputus kepada Beliau, Amin
Kepada yang tersayang Adik-adik
Yang telah membantu
Ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku
Dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua
Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt.
Mencatatnya sebagai amal beliau dan
Membalasinya dengan rahmat dan karunia yang
Setimpal, Amin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan penulis sehingga dapat menyelesaikan Usulan Penelitian. Adapun judul dari Skripsi ini **“Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Untuk itu penulis mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag., M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik, Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si.
4. Seketaris Progam Studi Ilmu Administrasi Publik Bapak Eko Hadrian, S.Sos, M.Si.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. A. Tarmizi, M.A., telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberi arahan dan

masukannya kepada penulis dan selalu bertindak bijaksana dan sabar dalam bimbingan berlangsung.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Staf Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu, Berserta Adik-adik ku. Yang selalu suport Penulis menyelesaikan Skripsi.
9. Teman-teman Seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Penulis,

Jelita Gea

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRCT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	ix
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Teori Administrasi dan Administrasi Publik	13
2. Teori Organisasi dan Organisasi Publik.....	13
3. Teori Manajemen dan Manajemen Publik	17
4. Teori Otonomi Daerah	19
5. Teori Kebijakan Publik	21
6. Teori Pelaksanaan	24
7. Teori Pelaksanaan Kebijakan	25
8. Teori Evaluasi	27
9. Evaluasi Kebijakan, dan Teori Pengembangan Manajemen Kota .	29
B. Kerangka Pikir	31
C. Hipotesis.....	34
D. Konsep Operasional	34
E. Operasional Variabel.....	37
F. Teknik Pengukuran	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Populasi Dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	47
E. Informan dan Key Informan	47
F. Jenis Dan Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknis Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	51
B. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	53
BAB V HASIL PENELITIAN	58
A. Identitas Responden	58
B. Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir	61
C. Hambatan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir	70
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Distribusi Bank Sampah Kota Pekanbaru	4
Tabel II.1	Operasional Variabel Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	27
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).....	39
Tabel III.2	Informan dan Key Informan Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)	40
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).	32
Tabel V.1	Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Pesisir	53
Tabel V.2	Tingkat Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	54
Tabel V. 3	Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	55
Tabel V. 4	Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	57
Tabel V. 5	Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	59
Tabel V. 6	Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	60

Tabel V. 7 Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	62
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)..	23
-------------	---	----



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jelita Gea
NPM : 147110815
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,

Jelita Gea

**STUDI PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(STUDI PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
RUMBAI PESISIR)**

ABSTRAK

Jelita Gea

Penelitian ini untuk mengetahui Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir). Indikator penilaian Pengelolaan sampah yang digunakan meliputi: Indikator *Input*, Indikator *Process*, Indikator *Outouts*, Indikator *Outcomes*. Tipe penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini menggunakan *Survey Deskriptif*. Dengan menggunakan Kuantitatif dan Kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 Orang. Teknik Pengambilan sampel menggunakan *Isidental Sampling*. Hasil penelitian ini bahwa Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir). Berada dikategorikan Efektif dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tujuan Mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru periode sebelumnya;

Kata Kunci :Pelaksanaan Pengelolaan dan Sampah

**STUDY OF WASTE MANAGEMENT IMPLEMENTATION BY THE
ENVIRONMENTAL AND CLEAN ENVIRONMENT OF PEKANBARU CITY
(STUDY OF WASTE MANAGEMENT IN DISTRICT
COASTAL COMMUNITY**

ABSTRACT

Jelita Gea

This research is to determine the Study of Waste Management Implementation by the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City (Study of Waste Management in Rumbai Pesisir District). The waste management assessment indicators used include: Input Indicators, Process Indicators, Outouts Indicators, Outcomes Indicators. This type of research is located in the office of the Environmental and Cleanliness Office of Pekanbaru City. This research method uses descriptive survey. By using Quantitative and Qualitative. The population in this study amounted to 14 people. The sampling technique used was incidental sampling. The result of this research is that the Study of Waste Management Implementation by the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City (Study of Waste Management in Rumbai Pesisir District). Being is categorized as Effective in implementing Waste Management. The Pekanbaru City Environment and Sanitation Service has the objective of knowing the performance of the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service in the previous period;

Keywords: Evaluation, Implementation and Management of Waste

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pulau yang saling berjajaran satu dengan yang lainnya, saling nyambung-menyambung menjadi satu. Dalam artian Negara merupakan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Yang mempunyai kaidah dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kota adalah sebuah istilah atau kata yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat yang memperdalam studinya mengenai Kota. Karena hal inilah bagi masyarakat awam kata Kota ini seolah-olah tidak memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pada saat orang menanyakan asal tempat tinggal Kota asal dan kemudian dijawab dengan menyebut Kota tertentu maka orang yang diajak bicara akan langsung memahaminya. Sabari (2005;7).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan yang antara lain urbanisasi, pemukiman kumuh, persampahan, dan sebagainya. Permasalahan yang dialami hampir diseluruh kota di Indonesia adalah persampahan. Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, disamping produk utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia Masalah pertumbuhan penduduk yang

terus meningkat dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, maka berdampak pada keadaan lingkungan semakin kotor dan kesehatan masyarakat terganggu, hingga kini belum juga dapat teratasi dengan baik. Seperti halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru, kebersihan lingkungan masih jauh dari harapan, karena sampah berserakan dimana-mana dan keadaan kebersihan lingkungan semakin kurang sehat, apalagi bertambahnya sampah buangan maupun limbah yang dibuang yang tidak pada tempatnya.

Semakin banyak jumlah pembuangan sampah perharinya, sehingga bisa mengakibatkan lingkungan menjadi : banjir, sarang nyamuk, bau sampah, dan lain-lain. Akan membahayakan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru. Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru, telah mengeluarkan Perda Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Satuan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sudah pernah menangkap tangan warga yang membuang sampah sembarangan, dan telah dijatuhi denda, kata Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi DLHK Kota Pekanbaru, Wenny Arizona. Satuan Tugas (Satgas) DLHK berjumlah 60 orang ini salah satu fungsinya menggelar patroli rutin untuk menangkap tangan warga yang membuang sampah sembarangan. Mereka berpatroli tiap hari kerja sejak pukul 06.00 hingga 15.00 WIB dengan berkeliling kota. "Rata-rata yang ditangkap karena buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya dan buang sampah di luar jadwalnya," kata Wemny Arizona, menjelaskan alasan penangkapan. Patroli Satgas DLHK diakuinya sudah mulai membuahkan hasil karena di jalan-jalan protokol jumlah tumpukan sampah

berkurang, mengingat warga yang biasanya mencemari lingkungan ketakutan karena banyak warga terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Namun, Satgas akan terus melakukan patroli di daerah lain karena bisa jadi warga hanya berpindah tempat membuang sampah sembarangan. "Karena titik yang kami jaga mengalami pengurangan sejak ada OTT, maka kami pindah ke titik yang lain," Kata Wenny Arizona. Dasar hukum operasi tersebut, lanjut dia, adalah Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru 2019. Warga yang terjaring OTT bisa dikenakan denda minimal Rp 250.000 hingga Rp 5 juta, sesuai berat dan jenis sampah yang dibuang. "Jadi, pada 2020 ini semua yang terjaring membayar denda Rp 250.000. Semuanya masuk ke kas daerah," kata Wenny Arizona. Perwako 2018 itu mengatur lebih rinci tentang besar denda pencemar lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. yang menyatakan, denda sebesar Rp 2,5 juta per orang bagi yang terjaring OTT. Wenny Arizona mengatakan, penerapan Perda tersebut kurang berhasil karena banyak warga keberatan untuk membayar denda sebesar itu.

Padahal, sejak diberlakukan pada 1 Agustus 2014 hingga akhir Desember 2018, kurang lebih sekitar 100 orang sudah terjaring OTT karena buang sampah sembarangan. "Yang 2018 itu tidak (denda) hanya surat pernyataan, karena masyarakat keberatan membayar denda sampai Rp 2,5 juta, karena angkanya terlalu tinggi," Kata Masyarakat yang tertangkap. Wenny Arizona menambahkan, produksi sampah di Pekanbaru mencapai 100 ton per hari berdasarkan perhitungan DLHK. Namun, jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan

akhir (TPA) di Muara Fajar berkisar 600-700 ton per hari. Dari jumlah sampah tersebut, sekitar 80 persen berupa sampah plastik yang sulit diuraikan secara alami

Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Riau, mengakui belum maksimal dalam pengangkutan sampah di pemukiman warga. Pasalnya, mobil angkut sampah yang beroperasi hanya 18 unit "Kumpul angkut buang sekarang belum maksimal," kata Sekretaris DLHK Pekanbaru Elmawati.

Pada Zona 1 dan Zona 2 telah dilakukan Swastaniasasi Pengangkutan Sampah, dimana Pengelolaannya diserahkan pada PT. Samhana Indah (SHI) untuk Zona 1 dan PT. Godang Tua Jaya (GTJ) Untuk Zona 2. Sedangkan untuk Zona 3 masih diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Zonasi Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru ini dilakukan agar terwujudnya Pengangkutan Sampah yang Efektif dan Efisien Pada Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 Menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di Muara Fajar, Rumbai. Zonasi pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru ini tidak diiringi dengan kesadaran Masyarakat terkait aturan Pembuangan Sampah, maka, Zonasi ini tidak akan seefektif dan seefisiensi yang diharapkan.

1. Zona 1 Meliputi 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Zona 2 Meliputi 7 Kecamatan yaitu: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya.

3. Zona 3 Meliputi 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dengan Tujuan dari Pasal 3 Perda No. 8 Tahun 2014 yang berbunyi Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih,
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat,
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan;
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Prinsip dari Pasal 4 Perda No. 8 Tahun 2014 yang berbunyi Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan Prinsip :

1. Keterpaduan,
2. Akuntabilitas,
3. Transparansi,
4. Efisiensi,
5. Efektifitas; dan
6. Kepastian Hukum.

Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Aturan yang sudah dikeluarkan tetapi keadaan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Pekanbaru, belum sesuai yang diharapkan. Masih banyaknya sampah diberbagai tempat belum terkelola dengan baik, sehingga sampah berserakan dimana-mana, membuat kondisi lingkungan

menjadi kurang nyaman dan dikuatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru.

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai. Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah ini telah membawa akibat berantai bagi pencemaran lingkungan, seperti: mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, tersumbatnya saluran drainase dan aliran sungai. Tidak seimbangnya sarana persampahan serta pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal, Sabari (2005;57).

Daur Ulang dalam Pengelolaan Sampah Mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, briket merupakan contoh produk hasilnya. Tidak semua barang bisa didaur ulang namun saat ini sudah banyak industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang (misalnya : kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, sisa kain), sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke TPA (Tempat Pemosresan Akhir).

Salah satu cara Penanganan Sampah perlu menyediakan Bank sampah, merupakan suatu unit pengolahan sampah yang di dalamnya terdapat proses daur

ulang sampah–sampah dari jenis non organik maupun pengkomposan untuk jenis sampah organik. Di Kota Pekanbaru, terdapat 5 Distribusi Bank Sampah yaitu :

Tabel I.1 : Distribusi Bank Sampah Kota Pekanbaru

No	Nama	Kecamatan	Alamat
1	2	3	3
1	Bank Sampah	Tenayan Raya	Jl. Gajah No. 33 Kulim
2	Bank Sampah Berlin Labuay	Bukit Raya	Jl. Embun Pagi Kel. Tangkerang Labuay
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Tampan	Jl. H.R Soebrantas No. 52
4	Bank Sampah Mitra Karya	Payung Sekaki	Jl. Pemuda
5	Bank Sampah Berlian	Bukit Raya	Jl. Datuk Setia Maharaja

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk itu Masyarakat Kota Pekanbaru, Khususnya Kecamatan Rumbai Pesisir. Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3 Perda No. 8 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih,
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat,
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Pasal 5 Perda No. 8 Tahun 2014 Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meliputi :

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah,
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah,
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah,
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah,
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah,
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah,
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam Output Kebijakan Pemerintah Pasal 6 Perda No. 8 Tahun 2014 Untuk melaksanakan tugas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai kewenang :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi,

2. Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah,
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
4. Menetapkan lokasi TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir),
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup,
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2014 Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan :

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah,
2. Rencana induk pengelolaan sampah,
3. Studi kelayakan pengelolaan sampah.

Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun perumusan suatu kebijaksanaan merupakan suatu keharusan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa masyarakat bukan hanya sekedar obyek namun merupakan subyek yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan. Kontribusi masyarakat dipandang perlu sebagai salah satu sumbangan pokok dalam pembangunan.

Pasal 8 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2014 Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Kota Pekanbaru dan/atau Pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu Pemerintah Kota Pekanbaru,
2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan, penyelenggaraan dan Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Sampah,
3. Memperoleh Informasi yang Benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah,
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA (Tempat Pemosresan Akhir),
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9 ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2014 Setiap Orang Berkewajiban :

1. Mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasasn lingkungan,
2. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan tempat tinggal atau tempat usaha,
3. Memelihara dan menjaga kebersihan dan saluran air, waduk, situ, kolam dan sungai yang terletak dilokasi atau disempadan tempat tinggal atau tempat usaha.

TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah sampah dari masyarakat sementara untuk selanjutnya diteruskan ke TPA (Tempat Pemosresan Akhir). Tujuan dari TPS (Tempat

Penampungan Sementara) untuk menghindari masyarakat membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial. Adapaun fenomenadalam penelitian ini antara lain :

1. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah, sehingga terdapat sampah yang masih berserakan dan mengakibatkan bau yang menyengat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
2. Dalam mengambil sampah Pemerintah Kota Pekanbaru yang terakait, sampah tidak dipungut berdasarkan periode yang normal. Sehingga mengakibatkan sampah menumpuk di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
3. Volume Masyarakat dalam Pembuangan Sampah yang semakin meningkat, yang mengakibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus berkerja keras dalam menangani pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada diatas permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penelitian : **“Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti tentang **“Pelaksanaan Studi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)”?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Proses Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).
- b. Melakukan Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).
- c. Hasil Evaluasi Hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Administrasi.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu peneliti ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Teori Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja kelompok manusia orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, Nawawi (dalam Inu Kencana. 2003;5).

Menurut Waldo (dalam Faried, 2014;5) Administrasi adalah kerjasama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran.

Sedangkan Syafri (2012;3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemeberian nomor/kode surat, pengetikan, pengadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi/instansi.

Kemudian yang dikatakan Siagian (2008;2) dalam bukunya bahwa administrasi tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalistas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ciri-ciri Administrasi Menurut Tarmizi (2020) dalam Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut :

- a. Sekelompok Orang
- b. Kerja/Aktivitas
- c. Relasi Komunikasi
- d. Dinamika Kelompok
- e. Kerjasama
- f. Tujuan
- g. Target Yang Akan Dicapai
- h. Reaksi/Penilaian
- i. *Prograss-Improve*
- j. *Sustainable/Berkelanjutan*

Tugas dan Fungsi yang diselenggarakan Administrasi Menurut Betram

M. Gross (dalam Tarmizi 2020) dalam Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

- a. *Managing* (Mengurus dan menata laksanakan)
- b. *Administering* (Mengatur)
- c. *Governing* (Memerintah)
- d. *Guiding* (Memberi Petunjuk)
- e. *Coordinating* (Menyelenggarakan)
- f. *Integrating*
- g. *Running* (Menjalankan)
- h. *Directing*
- i. *Supervising*
- j. *Controlling*

Persepsi Umum Tentang Administrasi Menurut Tarmizi (2020) dalam Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau

- a. Kerja-kerja kantor
- b. Surat menyurat
- c. Pelayanan Administrasi
- d. Administrasi Kantor
- e. Manajemen Kantor

Menurut Teyusa (dalam Tarmizi 2020) dalam Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Administrasi adalah proses penyelenggaraan Negara dalam berbagai bidang

melalui proses menggembelng kemampuan/moral untuk meningkatkan kinerja Struktur Pemerintah dan demi kepentingan Publik dengan hasil-hasil kinerja yang Efektif, Efisien, Akuntabel demi wujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anggara (2012;21) adapun orang-orang pengisi organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Administrator,
- b. Manajer,
- c. Pembantu ahli (*staf*),
- d. Karyawan.

Administrasi Publik Menurut Nigro (dalam Wirman 2012;20) mengungkapkankan Administrasi Publik adalah Usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara Meliputi ketiga cabang Esekutif, Legislatif dan Yudikatif. Memiliki peran penting dalam pembuatan Kebijakan Publik sehingga merupakan bagian dari proses politik, berbeda secara signifikan dengan Administrasi swasta, berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat.

Administrasi Publik Menurut Dwight Waldo (dalam Wirman 2012;21) adalah Organisasi dan Manajemen manusia dan material (peralatanya) untuk mencapai tujuan-tujuan Pemerintah.

2. Teori Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi Menurut Siagian (2008;96) adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Secara terperinci Syafri (2012;12) mengemukakan Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan

tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Sedangkan Menurut Nawawi (2008;13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

- a. Manusia
- b. Filsafat
- c. Proses
- d. Tujuan

Veithzal dkk (2009;169) mengemukakan organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang berdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Selanjutnya Hamim (2005;24) menjelaskan bahwa organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan Barnard (dalam Miftah Thoha 2010;167) yang menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari manusia atau lebih.

Organisasi Publik adalah adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme dasar yang dilakukan individu-individu menurut, Kusdi (2009;25)

3. Teori Manajemen, Manajemen Publik dan Manajemen Kota

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008;1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen tentunya memiliki tujuan, adapun tujuan manajemen menurut Siswanto (2013:28) adalah sebagai berikut: Sesuatu yang ingin direalisasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Tujuan manajemen dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan menurut hirarki tertentu, hirarki tujuan yang dimaksud adalah:

- a. Tujuan Pokok
- b. Tujuan Bagian,
- c. Tujuan Kelompok,
- d. Tujuan Kesatuan, dan
- e. Tujuan Individu.

Hasibuan (2002;2) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil

guna unsur- unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Pentingnya manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Siagian (2003;4) Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Manifestasi Administrasi dan Manajemen dalam Organisasi Menurut Tarmizi (2020) dalam Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 : Manifestasi Administrasi dan Manajemen dalam Organisasi

Fungsi	Tindakan	Resultan/Efek
<i>Planning</i>	Menentukan berbagai Tujuan/ Arah dicapai	Dasar dengan kebijakan
<i>Organizing</i>	Tentukan akt pokok Kelompok akt/job Kel job tanggung jawab Mengisi jab yang sesuai	Struktur formal ident job, hub rep dengan koordinasi, departemen dan prosedur, ciptakan situasi yang memungkin untuk struktur informal
<i>Directing</i>	Memperkasai, Memfokus dan mengarahkan bawahan	Aliran kom, aktifkan rencana, dukung prioritas-prioritas
<i>Controlling</i>	Memonitor kinerja arahan sesuai tujuan	Standart kerja, media laporan, metoda-metoda standart bagian dari struktur

Sumber: Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, 2020

Manajemen Publik adalah faktor utama dalam suatu Administrasi Publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk Organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia, dengan demikian Manajemen Pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu Organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat. Waluyo (2007;23)

Manajemen Publik Menurut Overman (dalam Pasolong 2010;83) adalah studi *Interdisipliner* dari aspek-aspek umum Organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi Manajemen seperti *Planing*, *Organizing* dan *Controlling*.

4. Teori Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep otonomi daerah, pada hakikatnya mengandung arti pada kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun Administratif, menurut prakasa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam mengambil keputusan dengan prakasa sendiri adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat.

Rosidin (2010:46) menambahkan bahwa sebagai suatu Negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah, dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan.
- b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa) yang sudah lama dibangun dan dipelihara.
- c. Sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional yang terjadi pada tahun 1997.
- d. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh karena sebuah demokrasi tidak mungkin dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional.
- e. Keadilan. Otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendestralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah (Rosidin, 2010:44).

Rosidin (2010:47) menyatakan bahwa pada Pasal 22 Undang undang Nomor 32 tahun 2004 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat:
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi:
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan:
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan:
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan:
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak:
- h. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah:
- i. Melestarikan lingkungan hidup:

- j. Mengelola administrasi kependudukan:
- k. Melestarikan nilai sosial budaya:
- l. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya: dan
- m. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Teori Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb): pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kata kebijakan secara *etimologis* berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konteks tersebut penulis berpendangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik (Islamy, 2007:12).

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012:18) mengatakan bahwa secara umum, istilah “kebijakan” atau “*Policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah faktor dalam suatu bidang atau bidang

kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Syafiie (2014:145) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*Wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Dye dalam Syafiie (2014:145) menambahkan bahwa perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiadakan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut James E Anderson dalam Islamy (2009: 17), kebijakan adalah: *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Agustino (2014:7), bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson dalam Agustino (2014:7), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2014:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Mustopadidjaja dalam Nawawi (2013:90) merumuskan kebijakan publik sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji berbagai disiplin ilmu

dan tingkatan kompleksitas serta dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan sementara itu, dalam perspektif manajemen.

Menurut Nawawi (2013:88) dalam semua tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintahan peran dan fungsi pemerintah tidak bisa dianggap kecil, meskipun sudah bergeser titik tekannya. Dalam kenyataannya, hampir tidak ada kegiatan privat yang tidak terkait atau tidak berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan pemerintah khususnya dengan apa yang disebut birokrasi. Aparatur birokrasi senantiasa menjadi ujung tombak dalam merealisasikan atau menerjemahkan kebijakan agar menjadi sesuatu yang nyata yaitu mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya bersama semua *stakeholders* yang terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan. Dimana, khususnya di negara berkembang adalah birokrasi yang menjadi tumpuan dari pelaksanaan kebijakan sekalipun peran dan fungsi masyarakat semakin penting dan menentukan.

6. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (2015:57) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi

Pelaksanaan adalah semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik atau privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih

dahulu dalam keputusan kebijakan. Van Matel dan Van Horn (dalam Hamdi, 2014:99).

Dari pengertian diatas faktor-faktor yang menunjang program pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.
- b. Sumber Daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang dipelukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada peleksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

7. Teori Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Nawawi (2013:88) dalam semua tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintahan peran dan fungsi pemerintah tidak bisa dianggap kecil, meskipun sudah bergeser titik tekannya. Dalam kenyataannya, hampir tidak ada kegiatan privat yang tidak terkait atau tidak berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan pemerintah khususnya dengan apa yang disebut birokrasi. Aparatur birokrasi senantiasa menjadi ujung tombak dalam merealisasikan atau menerjemahkan kebijakan agar menjadi sesuatu yang nyata yaitu mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya bersama semua *stakeholders* yang terlibat dalam proses perumusan dan pengambilang kebijakan. Dimana, khususnya di negara berkembang adalah

birokrasi yang menjadi tumpuan dari pelaksanaan kebijakan seklaipun peran dan fungsi masyarakat semakin penting dan menentukan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:32), tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar

untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

8. Teori Evaluasi

Menurut Agustino (2014:175), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012:229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut Suchman dalam Winarno (2012:233) bahwa enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, fokus kita dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, seperti misalnya pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Hal ini berarti bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain
- b. Analisis terhadap masalah, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan Ukuran keberhasilan suatu program adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan standarisasi kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaan mendasar dalam riset evaluasinya adalah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, apakah fasilitas, sumber daya yang digunakan dalam kebijakan, bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran dari program tersebut
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi Ketika kita berbicara tentang outcome dalam evaluasi kebijakan, maka sedikitnya mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang ingin kita selesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan (objektivitas kebijakan), bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya (program), dan bila ada, apa yang kita kerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu). Merupakan hal yang wajar apabila dalam mengukur keberhasilan, kita perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi kehidupan yang terjadi sesungguhnya, seperti pengurangan jumlah pengangguran, tetapi juga sudah menjadi kewajiban para decision

makers untuk melihat dampak dari formulasi kebijakan yang diimplementasikan

- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program.

Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007:3) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) *indikator input*, (2) *indikator process*, (3) *indikator outputs* dan (4) *indikator outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Indikator input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. *Indikator process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. *Indikator outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. *Indikator outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

9. Teori Evaluasi Kebijakan

Dunn (2003:610), menjelaskan evaluasi merupakan salah satu dari proses siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Berpendapat ada beberapa kriteria kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

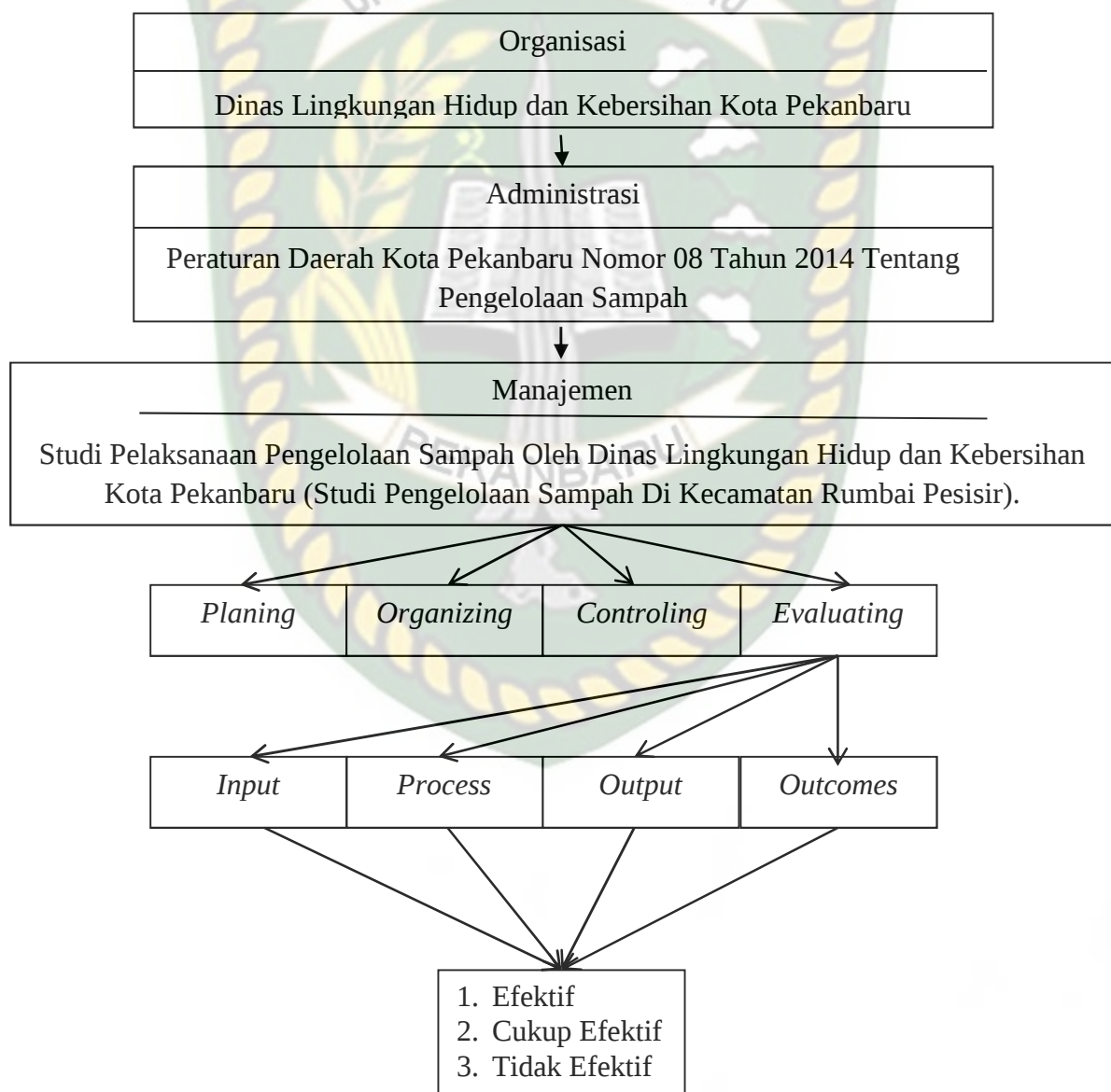
- a. Efektifitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.
- b. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
- d. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
- e. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
- f. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Manajemen Kota adalah sebuah istilah atau kata yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat baik masyarakat awam maupun masyarakat yang memperdalam studinya mengenai Kota. Menurut Sabari (2005;7) Oleh karena pengertian Kota ditinjau dari eksistensi wilayahnya yang dibatasi oleh batas-batas yang diatur oleh Undang-Undang, maka kenampakan wilayahnya pada umumnya tidak hanya menunjukkan kenampakan Kekotaan saja baik dari segi fisik, ekonomi, sosial maupun kultural, Namun di beberapa bagian wilayahnya sangat mungkin terlihat kenampakan Kedesaan. Sabari (2005;10).

B. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) adalah sebagai berikut

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

1. *Planing* atau Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. *Organizing* atau Organisasi adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
3. *Controlling* atau Pengawasan adalah satu diantara beberapa fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan semula.
4. *Evaluating* atau Penilaian adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya penilaian maka akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan cara memperbaikinya.
 - a. *Indikator input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Berfokus terhadap pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

- b. *Indikator process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengelolaan sampah Pada Zona 3 yaitu Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan.
- c. *Indikator outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dalam Zona 3 yang ditangani oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai hasil yang maksimal dalam Pengelolaan Sampah.
- d. *Indikator outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tujuan agar masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir di Zona 3 yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,

terbebas dari sampah yang menumpuk, bau yang menyengat, banjir, dan lain-lain.

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : “ Diduga Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)”.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan untuk memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam penelitian, maka penulis perlu menjelaskan konsep operasional, yaitu sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama,
3. Kebijakan Publik kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah,

4. Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan,
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan,
6. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah,
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah,
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat,

9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik,
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus,
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya,
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah,
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah,
14. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah,
15. Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah,
16. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah,
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan,

18. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu,
19. Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007: 3) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) <i>indikator input</i> , (2) <i>indikator process</i> , (3) <i>indikator outputs</i> dan (4)	Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)	1. <i>Indikator Input</i>	1. Pengelolaan sampah yang dibutuhkan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 2. Biaya yang dibutuhkan dalam Pengelolaan sampah 3. Orang dan Badan-badan yang terlibat dengan Pengelolaan Sampah	Ordinal
		2. <i>Indikator Process</i>	1. Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah 2. Kendala yang dirasakan oleh Masyarakat Rumbai Pesisir KotaPekanbaru	Ordinal
		3. <i>Indikator Outputs</i>	1. Peran Dinas	Ordinal

<i>indikator outcomes.</i>			Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	
			2. Tanggapan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan sampah	
		4. <i>Indikator Outcomes</i>	1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terkait Pengelolaan sampah 2. Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan sampah	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir). dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu : Tercapai, cukup tercapai dan kurang tercapai.

Variabel dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah :

- a. Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 67-100%

- b. Cukup Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 34-66%
- c. Kurang Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 1-33%

Sedangkan untuk masing-masing indikator melihat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Input* adalah Berfokus terhadap pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

- a. Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 67-100%

b. Cukup Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 34-66%

c. Kurang Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 1-33%

2. *Process* adalah memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada Masyarakat Rumbai Pesisir. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan.

a. Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 67-100%

b. Cukup Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 34-66%

c. Kurang Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 1-33%

3. *Outputs* adalah (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dalam Zona 3 yang ditangani oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai hasil yang maksimal dalam Pengelolaan Sampah.

a. Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) 67-100%

b. Cukup Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 34-66%

c. Kurang Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 1-33%

4. *Outcomes* adalah (dampak) yang ditimbulkan dari mana Pengelolaan Sampah yang dirasakan oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tujuan agar masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir di Zona 3 yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, terbebas dari sampah yang menumpuk, bau yang menyengat, banjir, dan lain-lain.

a. Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 67-100%

- b. Cukup Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 34-66%
- c. Kurang Efektif :Apabila Penilaian responden terhadap indikator Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) Rata-Rata 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian survey deskriptif. Karena penulis bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi terhadap objek penelitian, yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode Kuantitatif dan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2010;58) penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka dan penelitian Kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2010;60).

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dan hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis Sugiyono (2010;57).

Dalam hal ini data-data angka berasal dari hasil penyebaran angket tentang Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan

informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dengan lokasi Penelitian adalah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, terjadi penumpukan sampah. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan perlunya Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir) untuk lebih baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010;90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.

Menurut Sugiyono (2010;91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk pupolasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul atau mewakili.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini :

Tabel III. I : Populasi dan Sampel Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	1	100 %
3.	Pegawai Bidang Pengelola Sampah	13	13	100 %
4.	KK Masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir	1023 KK	20 KK	1,95 %
5.	KK Masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir	986 KK	20 KK	2,02 %
6.	KK Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir	687 KK	20 KK	2,91 %
	Jumlah	-	-	-

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Perhitunganya adalah

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Note :

n = Number Of Samples (Jumlah Sampel)

N = Total Population (Jumlah Seluruh Anggota Populasi)

E = Error Tolerance (Toleransi terjadinya galat; taraf signifikan;)

P = Persentase

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini untuk Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik sensus, yaitu kepala dan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berjumlah 18 Orang dijadikan sampel.

Teknik pengambilan sampel untuk Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir menggunakan teknik *Insidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2010;96) *Insidental Sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*Insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer penelitian ini diperoleh langsung dari reponden dalam penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Observasi, Wawancara, dan Angket (kuisisioner). Berdasarkan kepada item penilaian mengenai Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).
2. Data Sekunder penelitian ini diperoleh melalui informasi dan keterangan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan

Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang valid yang dibutuhkan peneliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan dengan cara serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun, untuk dijawab dan dinilai.
2. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap semua objek kegiatan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).
3. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan mengajukan Tanya jawab oleh peneliti kepada yang berwewenang yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabdikan sebuah kejadian. Pencatatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung. Kemudian data dianalisa secara Kuantitatif dan Kualitatif, yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir). yang penulis rencanakan mulai Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020, berikut rincian waktu kegiatan pada tabel berikut ini :

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Pesisir).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																				
2	Seminar Up																				
3	Revisi Up																				
4	Revisi Quisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survay Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfrehesif																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Pedoman Penulisan UP FISIPOL UIR, 2013

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan Administrasi Di Riau.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Kota Pekanbaru mempunyai satu bandar udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya

Kota Pekanbaru terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar,
- b. Dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan,
- c. Dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,
- d. Sedangkan dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru mempunyai 12 Kecamatan yaitu: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan dan Tenayan Raya

Kecamatan Rumbai Pesisir Mempunyai 8 Kelurahan yaitu: Lembah Damai, Lembah Sari, Limbungan, Limbungan Baru, Meranti Pandak, Sungai Ambang, Sungai Ukai dan Tebing Tinggi Okura.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru sering menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk di Kota Pekanbaru yang memiliki 12 Kecamatan. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Gambaran Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. beralamatkan Jalan Datuk Setia Maharaja No. 4 Telp. (0761) 31516 Pekanbaru – 28125.

4. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Susunan organisasi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing-masing Kepala Dinas yang ada di Kota Pekanbaru untuk membantu menjalankan Visi dan Misi Walikota.

B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Visi :

Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

2. Misi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
- c. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- d. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

3. Dasar Pembentukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

4. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

- e. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- i. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- l. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- m. Pengelolaan keuangan dinas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah :

- a. Mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru periode sebelumnya;
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;

- c. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
- e. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

5. Zonasisasi Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru

- 4. Zona 1 Meliputi 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Marpoyan Damai
- 5. Zona 2 Meliputi 7 Kecamatan yaitu: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya.
- 6. Zona 3 Meliputi 2 Kecamatan yaitu: Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pada Zona 1 dan Zona 2 telah dilakukan Swastaniasasi Pengangkutan Sampah, dimana Pengelolaannya diserahkan pada PT. Samhana Indah (SHI) untuk Zona 1 dan PT. Godang Tua Jaya (GTJ) Untuk Zona 2. Sedangkan untuk Zona 3 masih diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Zonasi Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru ini dilakukan agar terwujudnya Pengangkutan Sampah yang Efektif dan Efisien Pada Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 Menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di Muara

Fajar, Rumbai. Zonasi pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru ini tidak diiringi dengan kesadaran Masyarakat terkait aturan Pembuangan Sampah, maka, Zonasi ini tidak akan seefektif dan seefisiensi yang diharapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjadi sampel adalah Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Masyarakat Rumbai Pesisir. Sampel dari Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah berjumlah 14 Orang dan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 60 KK. Berikut uraian identitas Responden yang terdiri dari Tingkat Umur, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.

1. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan. Adapun tingkat umur pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Tabel V.I : Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	20-30	3	21,4 %
2.	31-40	7	50 %
3.	41-50	2	14,3 %
4.	>50	2	14,3 %
Jumlah		14	100%

Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat umur Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Untuk usia 20-30 tahun berjumlah 3 Orang Dengan persentase 21,4 %, usia 31-40

tahun berjumlah 7 Orang dengan persentase 50 %, usia 41-50 tahun berjumlah 2 Orang dengan persentase 14,3 %, usia >50 tahun berjumlah 2 Orang dengan persentase 14,3 %. Dapat disimpulkan data responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, menurut tingkat umur di dominasi pada umur 31-40 tahun, dimana usia ini memiliki pengalaman kerja yang baik, sehingga diyakini mampu melaksanakan tugas dengan baik.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Maka semakin tinggi kinerja yang dimilikinya, berikut ini adalah tabel tingkat Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

Tabel V.3 : Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	7	50 %
4.	Diploma	-	-
5.	Strata 1	6	42,8 %
6.	Strata 2	1	7,2 %
Jumlah		14	100 %

Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru, yang berpendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) berjumlah 7 Orang dengan persentase 50 %, Kemudian yang berpendidikan Strata 1 berjumlah 6 Orang dengan persentase 42,8 %, sedangkan yang berpendidikan Strata 2 Berjumlah 1 Orang dengan persentase 7,2 %. Dengan demikian dapat disimpulkan pada umumnya Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut adalah Strata 1. Maka secara pengalaman pekerjaan sudah ahli dalam bidangnya.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur dari Responden. Jenis Kelamin ini mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam menjalankan suatu kegiatan, maupun pekerjaannya. Jenis Kelamin Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Laki-Laki	11	78,5 %
2.	Perempuan	3	21,5 %
	Jumlah	14	100 %

Sumber Olahan Penulis, 2020

Menjelaskan bahwasanya jumlah Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah 11 Orang dengan Persentase 78,5 %, sedangkan Perempuan berjumlah 3 Orang dengan Persentase 21,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada umumnya berjenis kelamin Laki-Laki.

B. Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir)

Pemerintah Kota Pekanbaru, telah mengeluarkan Perda Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan Tujuan dari Pasal 3 Perda No. 8 Tahun 2014 yang berbunyi Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih,
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat,
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan;
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Setelah dilakukan penelitian Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Rumbai Pesisir. Indikator dari masing-masing dapat dilihat dibawah ini :

1. Input

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Sampah yang dibutuhkan Sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014	14 100 %	-	-	14
2.	Biaya yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Sampah	14 100 %	-	-	14
3.	Orang dan Badan-badan yang terlibat dengan Pengelolaan Sampah	2 27,4 %	9 54,4 %	3 18,2 %	14
Jumlah		30	9	3	42
Rata-rata		10	3	1	14
Persentase		71,4 %	21,4 %	7,2 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator *Input* pada item penilaian, Melaksanakan Pengelolaan Sampah yang dibutuhkan Sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014, diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menjawab kategori Efektif Sebanyak 14 Orang dengan Persentase 100 %. Hal ini dikarenakan Melaksanakan Pengelolaan Sampah Sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014.

Dari item penilaian Biaya yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Sampah diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang menjawab kategori Efektif sebanyak 14 Orang dengan Persentase 100 %, hal ini dikarenakan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Biaya dibutuhkan dalam Pengelolaan Sampah.

Dari item penilaian Orang dan Badan-badan yang terlibat dengan Pengelolaan Sampah diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang menjawab kategori Efektif sebanyak 2 Orang dengan Persentase 27,4 %, Cukup Efektif 9 Orang dengan Persentase 54,4 %, Kurang Efektif sebanyak 3 Orang dengan Persentase 18,2 %. Hal ini dikarenakan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, ada Orang dan Badan-badan yang terlibat dengan Pengelolaan Sampah.

Hasil dari Indikator *Input*, Efektif dengan persentase 71,4%, Cukup Efektif dengan persentase 21,4%, Kurang Efektif dengan persentase 7,2%. Jadi dari Hasil penelitian Efektif 3 point, Cukup Efektif 2 point, Kurang Efektif 1 point. Untuk indikator *Input* dalam kategori Efektif dengan persentase 88,1%.

2. Process

Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1.	Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah	6 42,8 %	3 21,4 %	5 35,8 %	14
2.	Kendala yang dirasakan oleh Masyarakat Rumbai Pesisir	2 14,2 %	5 35,8 %	7 50%	14
Jumlah		8	8	12	28
Rata-rata		4	4	6	14
Persentase		28,6 %	28,6 %	42,8 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator *Process* pada item penilaian, Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah, diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menjawab kategori Efektif Sebanyak 6 Orang dengan Persentase 42,8 %, Cukup Efektif 4 Orang dengan persentase 21,4%, Kurang Efektif 5 dengan persentase 35,8%. Hal ini dikarenakan Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014.

Dari item penilaian Kendala yang dirasakan oleh Masyarakat Rumbai Pesisir diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang menjawab kategori Efektif sebanyak 2 Orang dengan Persentase 14,2%, Cukup Efektif 5 Orang dengan persentase 35,8%, Kurang Efektif 7 Orang dengan persentase 50%

hal ini dikarenakan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kendala yang dirasakan oleh Masyarakat Rumbai Pesisir.

Hasil dari Indikator *Process*, Efektif dengan persentase 28,6%, Cukup Efektif dengan persentase 28,6%, Kurang Efektif dengan persentase 42,8%. Jadi dari Hasil penelitian Efektif 3 point, Cukup Efektif 2 point, Kurang Efektif 1 point. Untuk indikator *Input* dalam kategori Cukup Efektif dengan persentase 61,9%.

3. Output

Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Dalam penelitian ini dimaksudkan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1.	Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	6 42,8 %	5 35,8 %	3 21,4 %	14
2.	Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah	3 21,4 %	4 28,6%	7 50 %	14
Jumlah		9	9	10	28
Rata-rata		4,5	4,5	5	14
Persentase		32,1%	32,1 %	35,8%	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator *Outpus* pada item penilaian, Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menjawab kategori Efektif Sebanyak 6 Orang dengan Persentase 42,8%, Cukup Efektif 5 Orang dengan persentase 35,8%, Kurang Efektif 3 Orang dengan persentase 21,4. Hal ini dikarenakan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014.

Dari item penilaian Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang menjawab kategori Kurang Efektif sebanyak 3 Orang dengan Persentase 21,4%, Cukup Efektif 4 Orang dengan persentase 28,6%, Kurang Efektif 7 Orang dengan persentase 50%. hal ini dikarenakan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil dari Indikator *Outputs*, Efektif dengan persentase 32,1%, Cukup Efektif dengan persentase 32,1%, Kurang Efektif dengan persentase 35,8%. Jadi dari Hasil penelitian Efektif 3 point, Cukup Efektif 2 point, Kurang Efektif 1 point. Untuk indikator *Input* dalam kategori Cukup Efektif dengan persentase 65,4%.

4. Outcome

Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Dalam penelitian ini dimaksudkan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1.	Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terkait Pengelolaan Sampah	7 50 %	4 28,5 %	3 21,5 %	14
2.	Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah	3 21,5 %	2 14,2 %	9 64,3 %	14
Jumlah		10	6	12	28
Rata-rata		5	3	6	14
Persentase		35,7 %	21,5 %	42,8 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui Dari tabel diatas dapat diketahui indikator *Outpus* pada item penilaian, Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terkait Pengelolaan Sampah, diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang menjawab kategori Efektif Sebanyak 7 Orang dengan Persentase 50%, Cukup Efektif 4 Orang dengan persentase 28,5%, Kurang Efektif 3 Orang dengan persentase 21,5%. Hal ini dikarenakan Peran Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terkait Pengelolaan Sampah sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014.

Dari item penilaian Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah diperoleh tanggapan Responden Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang menjawab kategori Kurang Efektif sebanyak 3 Orang dengan Persentase 21,5%, Cukup Efektif 2 Orang dengan persentase 14,2%, Kurang Efektif 9 Orang dengan persentase 64,3% hal ini dikarenakan Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Tanggapan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil dari Indikator *Outcome*, Efektif dengan persentase 35,7%, Cukup Efektif dengan persentase 21,5%, Kurang Efektif dengan persentase 42,8%. Jadi dari Hasil penelitian Efektif 3 point, Cukup Efektif 2 point, Kurang Efektif 1 point. Untuk indikator *Input* dalam kategori Cukup Efektif dengan persentase 64,2%.

Jadi dari hasil analisis penelitian dari 4 Variabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Indikator *Input* dengan persentase 88,1%
2. Indikator *Process* dengan persentase 61,9%
3. Indikator *Outouts* dengan persentase 65,4%
4. Indikator *Outcome* dengan persentase 64,2%

Hasil rata-rata persentase dari ke empat Variabel diatas adalah 69,9%. Studi pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru(Studi Pengelolaan Sampah dikecamatan Rumbai Pesisir) masuk dalam kategori Efektif dengan persentase 69,9%.

Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) *indikator input*, (2) *indikator process*, (3) *indikator outputs* dan (4) *indikator outcomes*. Berikut kesimpulan dari indikator di atas :

1. *Indikator input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Berfokus terhadap pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. *Indikator process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengelolaan sampah Pada Zona 3 yaitu Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan.

3. *Indikator outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dalam Zona 3 yang ditangani oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai hasil yang maksimal dalam Pengelolaan Sampah.

4. *Indikator outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tujuan agar masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir di Zona 3 yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, terbebas dari sampah yang menumpuk, bau yang menyengat, banjir, dan lain-lain.

C. Hambatan Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

Hambatan bisa menjadi penyebab yang mempengaruhi suatu kinerja dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini hambatan yang dirasakan oleh Pegawai Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurang Efektifnya Pengelolaan sampah, sehingga terdapat sampah yang masih berserakan dan mengakibatkan bau yang menyengat di beberapa lokasi Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Dalam proses pengambilan sampah Kota Pekanbaru, sampah tidak di pungut berdasarkan periode yang normal, sehingga mengakibatkan sampah menumpuk di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
3. Volume Masyarakat dalam pembuangan Sampah yang semakin meningkat, yang mengakibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus berkerja keras dalam melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dan saran Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir).

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan, Studi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Kategori Efektif, dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan rumbai Pesisir.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah :

1. Mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, progam dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;

5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan dalam Pengelolaan sampah, sehingga sampah yang masih berserakan dan mengakibatkan bau yang menyengat di beberapa lokasi Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru bisa cepat teratasi.
- b. Dalam pengambilan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sampah Harus dipunggut berdasarkan periode yang normal, sehingga mengakibatkan sampah menumpuk di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Masyarakat Rumbai Pesisir

Untuk Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir agar mengurangi Penggunaan Sampah dan tidak membuang sembarang, dikarenakan Mobil Sampah terkendala sehingga Sampah Belum Sempat diangkut. Volume Masyarakat dalam pembuangan Sampah yang semakin meningkat, agar dikurangi agar Pemerintah Kota Pekanbaru tidak terkendala melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, dan Baharuddin, 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar, PT Refika Aditama.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia.
- Dewi, Chrisyanti Ira, 2011. *Penggantar Ilmu Administrasi*, Surabaya; Prestasi Pustaka.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Kencana, Syafiie, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika Offset.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Riva'I Veitzal, dan Mulyadi Deddy, 2009. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Rajawali Press.
- Rosidin, Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Sabari Yunus, Hadi. 2005. *Manajemen Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, Sondang P., 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert, 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung , Sinar Baru Aglesindo.
- Siswanto, 2011. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabet.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Thoha, Miftah, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

B. Lampiran

Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Riau

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

C. Peneliti Terdahulu

Skripsi Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Mekar Sari Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Dumai (Studi Kecamatan Dumai Selatan). Oleh Tiara

D. Materi

Ahmad Tarmizi Yussa, 2020. *Teori Administrasi Pengenalan, Dasar dan Signifikan*. Pasca Sarjana Universitas Islam Riau